



Pendidikan Inklusif dan Aksesibilitas Indonedia dan Negara Lain

Diyoba Azhar Fuadi, Farika Istiana, Eriyanto, Janes Kurnia Hadi, Adi Asmara, Kashardi
Program Studi Magister Pedagogi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu
azharf413@gmail.com, farika_istiana@yahoo.com, eri236167@gmail.com, janesskurniahadi97@gmail.com,
adiasmara@umb.ac.id, kashardi@umb.ac.id

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan strategis dalam menjamin hak belajar seluruh peserta didik tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus, kelompok marginal, serta peserta didik dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan implementasi pendidikan inklusif dan aksesibilitas pendidikan antara negara maju dan negara berkembang, dengan fokus pada kebijakan, kurikulum, kompetensi guru, pemanfaatan teknologi, serta pendanaan pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan dengan menganalisis buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, laporan lembaga internasional, serta dokumen kebijakan pendidikan nasional dan global. Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis konten untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan praktik pendidikan inklusif antarnegara. Hasil kajian menunjukkan bahwa negara maju memiliki sistem pendidikan inklusif yang terintegrasi secara sistemik, didukung kebijakan yang kuat, pendanaan berkelanjutan, kurikulum adaptif, serta pengembangan kompetensi guru yang berkelanjutan. Sebaliknya, negara berkembang masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur ramah disabilitas, kesenjangan kompetensi pendidik, distribusi sumber daya yang belum merata, serta kesenjangan akses teknologi pembelajaran. Di Indonesia, meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah dikembangkan melalui Kurikulum Merdeka, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kontekstual, khususnya di wilayah terpencil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kebijakan pendidikan inklusif, peningkatan kompetensi guru, optimalisasi teknologi pendidikan adaptif, serta pendanaan yang berkeadilan merupakan kunci utama dalam mewujudkan sistem pendidikan inklusif yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Kata kunci: Pendidikan Inklusif; Aksesibilitas Pendidikan; Kebijakan Pendidikan; Negara Maju; Negara Berkembang

1. Latar Belakang

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan pemenuhan hak belajar bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus, kelompok marginal, serta individu dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Konsep pendidikan inklusif berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. Pendidikan inklusif tidak hanya bertujuan memberikan akses pendidikan yang setara, tetapi juga memastikan tersedianya lingkungan belajar yang aman, ramah, adaptif, serta mampu mengakomodasi kebutuhan individual peserta didik melalui penyesuaian kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem penilaian yang fleksibel (UNESCO, 2023). Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, pendidikan inklusif berperan strategis dalam membentuk masyarakat yang berkeadilan sosial, berkarakter inklusif, serta memiliki daya saing di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Pada tataran global, implementasi pendidikan inklusif menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju pada umumnya telah memiliki kerangka kebijakan pendidikan inklusif yang komprehensif, dukungan regulasi yang kuat, serta komitmen pendanaan yang berkelanjutan. Infrastruktur pendidikan di negara maju dirancang untuk menjamin aksesibilitas, seperti bangunan sekolah yang ramah disabilitas, penyediaan teknologi asistif, serta layanan pendukung pembelajaran yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, pengembangan kompetensi guru dalam pendidikan inklusif dilakukan secara sistematis melalui pelatihan profesional berkelanjutan, sertifikasi khusus, serta penguatan kapasitas pedagogik berbasis kebutuhan peserta didik. Pendekatan ini menjadikan proses pembelajaran lebih efektif,

berpusat pada peserta didik, dan berorientasi pada pengembangan potensi individu secara optimal (OECD, 2022; European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2021; Sree, 2022).

Sebaliknya, negara berkembang masih menghadapi tantangan yang kompleks dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Keterbatasan anggaran pendidikan berdampak pada minimnya sarana dan prasarana pendukung, khususnya di wilayah terpencil, perdesaan, dan daerah tertinggal. Ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus dalam pendidikan inklusif juga masih terbatas, baik dari segi pemahaman konseptual maupun keterampilan praktis dalam menangani keragaman kebutuhan belajar peserta didik. Selain itu, sistem pendataan dan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus di banyak negara berkembang belum berjalan secara optimal, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam perencanaan dan pemberian layanan pendidikan. Oleh karena itu, fokus kebijakan pendidikan di negara berkembang masih cenderung diarahkan pada pemerataan akses pendidikan dasar, sementara peningkatan kualitas layanan inklusif belum sepenuhnya menjadi prioritas utama (World Bank, 2021; UNICEF, 2022; Global Education Monitoring Report Team, 2020).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang telah menunjukkan komitmen dalam pengembangan pendidikan inklusif melalui berbagai kebijakan nasional, seperti penguatan regulasi sekolah inklusif, penyediaan layanan pendidikan khusus, serta integrasi prinsip keadilan, keberagaman, dan diferensiasi pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dan pendidik untuk menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik, minat, dan kebutuhan peserta didik. Namun demikian, tantangan dalam aspek aksesibilitas, kesiapan satuan pendidikan, ketersediaan sumber daya, serta kompetensi pendidik masih memerlukan perhatian serius dan berkelanjutan. Ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan berkeadilan (Kemendikbudristek, 2022; Tomasouw, 2024; IDinsight, 2024).

Dengan demikian, pendidikan inklusif dan aksesibilitas pendidikan merupakan elemen kunci dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada pengembangan potensi seluruh warga negara. Penguatan kebijakan pendidikan inklusif, peningkatan kompetensi pendidik, pemanfaatan teknologi pendidikan yang adaptif, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk memastikan tidak ada peserta didik yang tertinggal dalam menghadapi tantangan global abad ke-21.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian secara mendalam terhadap konsep, kebijakan, praktik, serta dinamika implementasi pendidikan inklusif dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia dan beberapa negara lain. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat menganalisis berbagai perspektif teoritis dan temuan empiris yang relevan sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai perbedaan karakteristik, tantangan, serta peluang pengembangan pendidikan inklusif dalam konteks nasional dan global.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari literatur akademik, meliputi buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional bereputasi, prosiding ilmiah, serta laporan resmi dari lembaga internasional seperti UNESCO, OECD, dan UNICEF. Selain itu, dokumen kebijakan pendidikan nasional Indonesia, laporan pemerintah, serta artikel dari situs resmi lembaga pendidikan digunakan sebagai sumber pendukung. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi topik, kredibilitas publikasi, dan kemutakhiran data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan dan penelaahan dokumen tertulis yang berkaitan dengan pendidikan inklusif dan aksesibilitas pendidikan. Dokumen yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus kajian, seperti kebijakan pendidikan inklusif, akses layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, kompetensi pendidik, sarana dan prasarana pendukung, serta pemanfaatan teknologi asistif dalam pembelajaran.

Subjek kajian dalam penelitian ini mencakup sistem pendidikan inklusif di beberapa negara maju, seperti Finlandia, Jepang, dan Amerika Serikat, serta negara berkembang, termasuk Indonesia, Malaysia, dan India.

Pemilihan negara tersebut didasarkan pada variasi kebijakan dan tingkat kesiapan sistem pendidikan inklusif yang memberikan gambaran perbandingan yang lebih luas dan beragam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (content analysis). Analisis dilakukan dengan cara menelaah, mengorganisasi, dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan praktik pendidikan inklusif dan aksesibilitas pendidikan antarnegara. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, sehingga hasil analisis memiliki dasar ilmiah yang kuat dan relevan sebagai rujukan pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

1. Aksesibilitas dan Pemerataan Pendidikan Inklusif

Aksesibilitas dan pemerataan pendidikan inklusif merupakan fondasi utama dalam mewujudkan keadilan pendidikan bagi seluruh warga negara. Negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Kanada telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin hak pendidikan tanpa diskriminasi melalui kebijakan inklusif yang terintegrasi secara sistemik. Pendidikan inklusif di negara-negara tersebut tidak hanya dipahami sebagai pemberian akses fisik ke sekolah, tetapi juga mencakup penyediaan lingkungan belajar yang ramah disabilitas, dukungan psikososial, layanan terapi pendidikan, serta sistem pendampingan individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap peserta didik dapat berkembang sesuai potensi dan kebutuhannya masing-masing (OECD, 2023; European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2022).

Di negara maju, aksesibilitas pendidikan diperkuat melalui integrasi kebijakan pendidikan dengan sistem kesejahteraan sosial. Pemerintah menyediakan subsidi pendidikan, layanan kesehatan pendukung, transportasi sekolah khusus, serta teknologi asistif yang dapat diakses secara gratis atau bersubsidi. Selain itu, sistem deteksi dini terhadap kebutuhan khusus anak dilakukan sejak usia prasekolah, sehingga intervensi pendidikan dapat diberikan lebih cepat dan tepat sasaran. Pendekatan preventif dan berkelanjutan ini terbukti mampu menekan kesenjangan capaian belajar antarindividu dan meningkatkan partisipasi sekolah kelompok rentan (UNESCO, 2023).

Sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia, India, dan Nigeria masih menghadapi tantangan struktural dalam pemerataan akses pendidikan inklusif. Hambatan geografis, keterbatasan sarana dan prasarana sekolah yang aksesibel, serta minimnya layanan pendukung pembelajaran menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Di banyak wilayah terpencil, sekolah belum dilengkapi fasilitas dasar seperti jalur kursi roda, alat bantu belajar khusus, maupun tenaga pendukung profesional, sehingga akses pendidikan inklusif masih bersifat simbolik (World Bank, 2022; UNICEF, 2023).

Di Indonesia, meskipun kebijakan sekolah inklusif telah dikembangkan, implementasinya masih menghadapi kesenjangan antarwilayah. Sekolah inklusif lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah pedesaan dan tertinggal masih kekurangan layanan pendidikan yang ramah disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan belum sepenuhnya diiringi dengan pemenuhan prinsip inklusivitas secara menyeluruh, sehingga hak belajar peserta didik berkebutuhan khusus belum sepenuhnya terpenuhi (Kemendikbudristek, 2023).

2. Kurikulum Inklusif dan Kualitas Pembelajaran

Kurikulum inklusif merupakan instrumen penting dalam menjamin kualitas pembelajaran yang adil bagi seluruh peserta didik. Negara maju umumnya menerapkan kurikulum yang fleksibel, adaptif, dan berbasis kompetensi dengan memberikan ruang luas bagi diferensiasi pembelajaran. Finlandia dan Australia, misalnya, mengembangkan kurikulum nasional yang memungkinkan guru menyesuaikan tujuan pembelajaran, materi, strategi, serta asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan individual peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (Ainscow, 2021; Slee, 2022).

Pendekatan kurikulum inklusif di negara maju menekankan pembelajaran bermakna, kolaboratif, dan kontekstual, sehingga peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam tetap dapat terlibat aktif dalam proses belajar. Diferensiasi pembelajaran tidak hanya meningkatkan partisipasi siswa, tetapi juga berdampak positif

terhadap hasil belajar akademik maupun perkembangan sosial-emosional. Kurikulum inklusif juga mendorong penguatan nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai bagian dari pendidikan karakter.

Di negara berkembang, implementasi kurikulum inklusif masih menghadapi berbagai kendala. Di Indonesia, meskipun prinsip pendidikan inklusif telah diintegrasikan dalam Kurikulum Merdeka, penerapannya di tingkat satuan pendidikan belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan pemahaman guru terhadap diferensiasi pembelajaran, beban administrasi yang tinggi, serta kurangnya panduan teknis yang aplikatif menyebabkan praktik pembelajaran inklusif berjalan tidak merata (Tomasoww, 2024; Suryadi & Putri, 2023). Akibatnya, kualitas pembelajaran inklusif sangat bergantung pada kapasitas dan inisiatif masing-masing sekolah atau guru.

3. Kompetensi dan Kesiapan Guru dalam Pendidikan Inklusif

Guru merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Di negara maju, pengembangan kompetensi guru dilakukan secara sistematis melalui pendidikan prajabatan yang menekankan pedagogi inklusif serta pelatihan profesional berkelanjutan. Guru dibekali kemampuan dalam melakukan asesmen diferensiatif, mengelola kelas heterogen, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik (OECD, 2022).

Jepang dan Korea Selatan, misalnya, wajibkan guru reguler untuk mengikuti pelatihan khusus pendidikan inklusif sebelum dan selama bertugas. Selain itu, guru didukung oleh tenaga profesional lain seperti psikolog pendidikan, terapis, dan asisten guru, sehingga layanan pendidikan inklusif dapat diberikan secara kolaboratif dan berkelanjutan (Yamazaki, 2022).

Sebaliknya, di negara berkembang, keterbatasan kompetensi guru masih menjadi tantangan utama. Banyak guru di Indonesia belum mendapatkan pelatihan khusus terkait penanganan peserta didik berkebutuhan khusus, terutama di daerah terpencil. Rendahnya kesejahteraan guru, keterbatasan akses pengembangan profesional, serta beban kerja yang tinggi turut memengaruhi kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran inklusif secara konsisten (Fitriani, 2023; Hidayat, 2024).

4. Pemanfaatan Teknologi dan Aksesibilitas Digital

Teknologi pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung aksesibilitas pendidikan inklusif. Negara maju telah memanfaatkan teknologi asistif, platform pembelajaran adaptif, serta kecerdasan buatan untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan individual peserta didik. Teknologi ini memungkinkan peserta didik dengan hambatan fisik, sensorik, maupun kognitif tetap dapat mengikuti pembelajaran secara optimal (OECD, 2023).

Di negara berkembang, kesenjangan digital masih menjadi tantangan serius. Keterbatasan infrastruktur internet, ketimpangan kepemilikan perangkat teknologi, serta rendahnya literasi digital guru dan siswa menyebabkan pemanfaatan teknologi inklusif belum berjalan optimal. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara kelompok peserta didik yang memiliki akses teknologi dan mereka yang tidak (UNESCO, 2022; Nugroho, 2023).

5. Pendanaan, Kebijakan, dan Keberlanjutan Pendidikan Inklusif

Pendanaan yang memadai dan kebijakan yang konsisten menjadi prasyarat utama keberlanjutan pendidikan inklusif. Negara maju secara konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup besar untuk mendukung layanan inklusif, termasuk pembiayaan pelatihan guru, penyediaan teknologi asistif, serta pembangunan infrastruktur ramah disabilitas (Williams, 2022).

Sebaliknya, negara berkembang masih menghadapi keterbatasan pendanaan dan distribusi anggaran yang belum merata. Implementasi pendidikan inklusif sering kali bersifat parsial dan bergantung pada proyek jangka pendek, sehingga sulit mencapai keberlanjutan program. Selain itu, lemahnya pengawasan kebijakan dan birokrasi yang kompleks turut menghambat efektivitas penggunaan anggaran pendidikan inklusif (World Bank, 2021; Prasetyo, 2024).

Diskusi

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan keadilan sosial serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Pendidikan yang merata dan inklusif tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, serta memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Negara yang mampu menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh warganya cenderung memiliki tingkat mobilitas sosial yang lebih tinggi dan kualitas pembangunan manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan nasional di berbagai negara.

Di negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Kanada, sistem pendidikan dirancang secara sistematis dengan prinsip kesetaraan dan inklusivitas sebagai landasan utama kebijakan. Seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis, budaya, maupun kondisi disabilitas, memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Negara-negara tersebut memandang pendidikan sebagai hak dasar sekaligus investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendidikan di negara maju relatif rendah karena kebijakan pendidikan difokuskan pada penghapusan hambatan struktural, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi capaian belajar peserta didik (European Commission, 2023; OECD, 2024).

Keberhasilan pemerataan pendidikan di negara maju didukung oleh kebijakan pendanaan pendidikan yang kuat, stabil, dan berkelanjutan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam jumlah besar dan mendistribusikannya secara merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan kelompok masyarakat rentan. Selain itu, regulasi pendidikan inklusif diberlakukan secara mengikat bagi seluruh satuan pendidikan, sehingga sekolah wajib menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Infrastruktur sekolah dirancang agar aksesibel, mulai dari desain bangunan, fasilitas pendukung, hingga penyediaan teknologi assistif yang menunjang proses pembelajaran inklusif.

Integrasi sistem kesejahteraan sosial dengan kebijakan pendidikan juga menjadi faktor penting dalam menjamin pemerataan akses pendidikan. Negara maju menyediakan berbagai bentuk subsidi pendidikan, bantuan sosial, transportasi sekolah, layanan kesehatan pendukung, serta beasiswa berbasis kebutuhan yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu. Kebijakan ini mampu mengurangi beban ekonomi keluarga sehingga partisipasi pendidikan dapat terjaga secara merata lintas kelompok sosial dan wilayah. Dengan demikian, faktor ekonomi tidak menjadi penghalang utama bagi anak untuk mengakses pendidikan berkualitas (UNESCO Institute for Statistics, 2024; World Bank, 2023).

Sebaliknya, negara berkembang—termasuk Indonesia—masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Laporan global terbaru menunjukkan bahwa negara berpendapatan menengah ke bawah masih mengalami kesenjangan signifikan dalam penyediaan layanan pendidikan bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, anak dari keluarga miskin, serta masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal dan terpencil (UNICEF, 2023; Global Education Monitoring Report, 2024). Ketimpangan ini mencerminkan adanya perbedaan kapasitas negara dalam menyediakan sumber daya pendidikan yang memadai dan merata.

Tantangan tersebut semakin nyata pascapandemi COVID-19, ketika disparitas sosial, geografis, dan kualitas layanan pendidikan menjadi semakin terlihat. Penutupan sekolah dan peralihan pembelajaran ke sistem daring memperlihatkan secara jelas kesenjangan akses teknologi dan kualitas layanan pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Peserta didik dari kelompok rentan mengalami kehilangan pembelajaran (learning loss) yang lebih besar dibandingkan dengan peserta didik dari keluarga mampu, sehingga ketimpangan hasil belajar semakin melebar.

Wilayah terpencil dan perdesaan menjadi kelompok paling terdampak akibat keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, minimnya tenaga pendidik berkualifikasi, serta rendahnya akses terhadap layanan pendukung pembelajaran. Banyak sekolah di daerah tertinggal masih menghadapi kondisi fisik bangunan yang kurang layak, kekurangan fasilitas belajar, serta rasio guru dan siswa yang tidak seimbang. Kondisi ini menyebabkan kualitas pembelajaran yang diterima peserta didik berbeda secara signifikan dibandingkan dengan wilayah perkotaan,

sehingga peluang keberhasilan pendidikan menjadi tidak setara (Asian Development Bank, 2023; Kemendikbudristek, 2024).

Transformasi digital dalam pendidikan yang diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan justru menghadirkan tantangan baru di negara berkembang. Kesenjangan akses internet, keterbatasan kepemilikan perangkat digital, serta rendahnya literasi teknologi di kalangan guru dan peserta didik menyebabkan sebagian kelompok semakin tertinggal dalam proses pembelajaran daring dan hybrid. Di banyak wilayah, teknologi belum berfungsi sebagai alat pemerataan, melainkan justru memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara kelompok yang memiliki akses dan yang tidak (International Telecommunication Union, 2024; UNESCO, 2025).

Secara global, masih banyak negara yang belum menyediakan sistem pendukung yang memadai bagi pendidikan inklusif. Laporan internasional mencatat bahwa sebagian besar negara berpenghasilan rendah belum memiliki kebijakan komprehensif untuk menjamin layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, migran, serta kelompok minoritas lainnya. Keterbatasan data, kurangnya tenaga profesional, serta minimnya pendanaan menjadi faktor utama lemahnya implementasi pendidikan inklusif, sehingga prinsip hak pendidikan universal belum sepenuhnya terwujud (Global Partnership for Education, 2023).

Dengan demikian, peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan di negara berkembang memerlukan strategi yang bersifat komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan yang inklusif dan ramah disabilitas, pemerataan distribusi dan peningkatan kompetensi guru, penguatan kebijakan pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, serta perluasan akses teknologi pembelajaran yang terjangkau dan adaptif. Selain itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan pendidikan inklusif dapat diimplementasikan secara efektif.

Dalam konteks global dan era digital saat ini, keadilan pendidikan hanya dapat dicapai apabila seluruh peserta didik, tanpa terkecuali, memperoleh kesempatan belajar yang setara dan bermutu. Pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bukan hanya tanggung jawab sektor pendidikan semata, tetapi merupakan bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan (UNESCO, 2025; OECD, 2024).

4. Kesimpulan

Perbandingan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan aksesibilitas pendidikan antara negara maju dan negara berkembang menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan sangat dipengaruhi oleh komitmen kebijakan, sistem pendanaan, kesiapan sumber daya manusia, desain kurikulum, serta dukungan infrastruktur yang ramah bagi keberagaman peserta didik. Negara maju umumnya memiliki kebijakan pendidikan inklusif yang terintegrasi secara sistemik, sehingga seluruh peserta didik—termasuk penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan masyarakat di wilayah terpencil—memperoleh layanan pendidikan yang setara dan bermutu. Aksesibilitas pendidikan diwujudkan tidak hanya melalui ketersediaan sekolah, tetapi juga melalui lingkungan belajar yang aman, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan individual peserta didik. Kurikulum di negara maju cenderung bersifat fleksibel, berbasis kompetensi, dan berorientasi pada peserta didik, sehingga mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan, gaya belajar, dan latar belakang sosial budaya. Pendekatan pembelajaran inklusif mendorong partisipasi aktif seluruh peserta didik, pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta kompetensi sosial-emosional sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21. Guru diposisikan sebagai agen utama pendidikan inklusif dengan dukungan seleksi profesional yang ketat, pelatihan berkelanjutan, serta kesejahteraan yang memadai, sehingga mampu menerapkan strategi pembelajaran diferensiatif secara efektif. Selain itu, pemanfaatan teknologi pendidikan di negara maju berperan penting dalam memperluas aksesibilitas pembelajaran. Teknologi asistif, pembelajaran digital adaptif, serta sistem manajemen pendidikan berbasis data digunakan untuk mendukung kebutuhan peserta didik yang beragam, termasuk mereka yang memiliki hambatan fisik, kognitif, maupun sosial. Pendanaan pendidikan yang stabil dan dikelola secara transparan memungkinkan pengembangan sarana prasarana inklusif, penguatan layanan pendukung, serta inovasi kebijakan berbasis riset. Sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan aksesibel. Ketimpangan akses pendidikan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur ramah disabilitas, rendahnya pemanfaatan teknologi pembelajaran inklusif, serta belum meratanya kompetensi guru dalam pendidikan inklusif menjadi kendala utama. Digital divide antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga memperlebar kesenjangan kesempatan belajar, terutama bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan

kelompok rentan. Dengan demikian, penguatan pendidikan inklusif dan aksesibilitas pendidikan di negara berkembang memerlukan reformasi pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi penguatan kebijakan pendidikan inklusif, peningkatan investasi pendidikan yang berkeadilan, transformasi kurikulum yang adaptif terhadap keberagaman, pemerataan distribusi dan peningkatan kompetensi guru, serta optimalisasi teknologi sebagai sarana pendukung pembelajaran inklusif. Langkah-langkah ini menjadi kunci untuk memastikan setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara dan bermakna dalam menghadapi tantangan global masa depan.

Referensi

1. Abdullah, R. (2020). *Educational reform and curriculum flexibility in developing nations*. Educational Review Journal, 18(2), 55–67.
2. Ainscow, M. (2021). *Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences*. Routledge.
3. European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2021). *Inclusive education in action*. Author.
4. European Commission. (2023). *Education and training monitor 2023*. Publications Office of the European Union.
5. Global Education Monitoring Report Team. (2020). *Inclusion and education: All means all*. UNESCO.
6. Kemendikbudristek. (2022). *Kurikulum Merdeka: Kerangka dasar*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
7. OECD. (2022). *Equity and quality in education: Supporting disadvantaged students and schools*. OECD Publishing.
8. Slee, R. (2022). *Inclusive education isn't dead, it just smells funny*. Routledge.
9. UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education*. UNESCO Publishing.
10. UNICEF. (2022). *Towards inclusive education: Global perspectives*. UNICEF.
11. World Bank. (2021). *Inclusive education and disability*. World Bank Publications.
12. World Bank. (2021). *Education financing in developing countries*.
13. World Bank. (2022). *Socioeconomic barriers to schooling*.
14. Wulandari, S. (2022). Faktor ekonomi dalam pemerataan pendidikan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(2), 122–138.
15. Williams, T. (2022). *Global spending on education: Trends and outcomes*. International Finance & Education, 22(2), 100–119.